



SERAHKAN DANA - Bupati Jembrana I Putu Artha saat menyerahkan dana talangan untuk para petani kakao, Selasa (30/5) kemarin.

Bali Post/ist

Setelah Gabah

Pemkab Jembrana Gulirkan Dana Talangan bagi Petani Kakao

DANA talangan kembali digulirkan Pemkab Jembrana kepada para petani di Jembrana melalui koperasi. Dana talangan kali ini diberikan kepada para petani kakao se-Jembrana. Bantuan diserahkan Bupati Jembrana kepada Koperasi Kertha Semaya Samaniya dengan nilai Rp 200 juta. Bantuan diserahkan di Ruang Rapat Bupati Jembrana, Selasa (30/5) kemarin. Turut hadir dalam acara tersebut Asisten II, I Gusti Putu Merthadana, Kadis Koperindag Made Gede Budhiarta dan Kepala Inspektorat Ni Wayan Koriani.

Bupati Artha menjelaskan pemberian dana talangan ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah

dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jembrana yang berbasis usaha ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini pola penyalurannya melalui lembaga koperasi. Ia berharap dana ini bisa digunakan tepat sasaran sesuai aturan sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

"Saya harap dana talangan ini jangan disalahgunakan. Jumlah ini termasuk kecil, lebih dari ini akan kita akomodasi, asalkan benar-benar disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita juga berharap melalui penyaluran dana ini petani Jembrana makin termotivasi untuk berproduksi lebih baik," kata Artha.

Kadis Koperindag Jembrana Made Gede Budhiarta berharap semua petani kakao nantinya masuk subak dan ikut program organik kakao Jembrana. Mengingat prestasi kakao Jembrana yang telah mengantongi 2 sertifikat organik Eropa dan Amerika.

Sementara itu, Ketut Wiadnyana selaku Ketua Koperasi Kertha Semaya Samaniya mengucapkan terima kasihnya atas bantuan dana talangan yang diserahkan Bupati Artha. "Nantinya dana ini akan digunakan untuk membeli biji kakao basah dari petani dengan harga terbaik sesuai kualitasnya. Ini bertujuan agar hasil kakao benar-benar dirasakan langsung oleh petani," cetusnya. (ad2486)

Edisi : Rabu, 31 Mei 2017

Hal : 12



ADD dan Dana Desa Sudah Ditransfer Songan B Dijatah Paling Besar



Bali Post/nan

I Ketut Pasek Lanang Sadia

Bangli (Bali Post) -

Pemkab Bangli telah mentransfer Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I untuk 68 desa di empat kecamatan di Bangli. Tak hanya itu, Dana Desa tahap pertama juga sudah ditransfer oleh pemerintah pusat. Dari bantuan ini, Desa Songan B dijatah paling besar. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Bangli I Ketut Pasek Lanang Sadia, Selasa (30/5) kemarin.

Lanang Sadia mengatakan, total ADD tahap I, yakni Rp 37.499.995.500. Sementara total ADD yang akan disalurkan ke 68 desa di Bangli adalah Rp 75 miliar.

Sementara untuk Dana Desa tahap pertama,

yakni Rp 30.834.347.400 dari jumlah bantuan total yang diberikan pusat sebesar Rp 55.783.753.000. "Dana yang kita transfer ke masing-masing desa sesuai pengamprahan yang dilakukan pihak desa," ungkap Lanang Sadia.

Dia mengatakan, ADD yang diberikan melalui pemerintah daerah nantinya akan diperuntukkan untuk semua pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Pembangunan itu haruslah sudah melalui proses dan prosedur yang jelas. Tujuannya agar dana tidak digunakan untuk kegiatan lain di luar program yang sudah ditentukan.

"Tidak sembarangan desa membuat apa saja memakai dana ADD maupun Dana Desa. Karena desa sudah dibatasi apa saja yang boleh dibangun memakai dana ini. Jadi sekarang ini tidak ada istilah uang siluman, mengingat peruntukannya sudah jelas. Dan dengan diterapkan aturan seperti itu, maka desa jauh akan lebih nyaman dalam bekerja. Bahkan kita ingatkan kalau ada pembangunan yang tidak sesuai dengan yang diperbolehkan, jangan mau dilakukan sehingga nantinya tidak menjadi temuan," jelasnya.

Dikatakan lebih lanjut, bantuan yang diberikan ke masing-masing desa nominalnya berbeda. Jumlahnya ditentukan berdasarkan variabel sesuai aturan, di antaranya jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah dusun dan KK miskin.

"Khusus untuk bantuan ADD yang paling besar diberikan kepada Desa Songan B sebesar Rp 1,7 miliar. Sedangkan bantuan yang paling kecil diberikan kepada Desa Binyan, Kintamani, yakni Rp 835.887 juta. Untuk Dana Desanya yang paling tinggi juga diberikan kepada Songan B, yakni sebesar Rp 1.238.494.000 dan yang paling kecil adalah Desa Batukaag, yakni Rp 765.347.000," katanya.

Menurutnya, sampai saat ini pihaknya belum berani memastikan sejauh mana realisasi pembangunan di masing-masing desa. Untuk serapan anggaran di desa disesuaikan dengan perencanaan pembangunan di masing-masing desa. "Kalau serapan yang sudah keluar dari pemda baru bisa diketahui. Kalau serapan di desa belum bisa dipantau berapa realisasinya. Karena serapan di desa baru bisa diketahui saat desa akan melakukan pengamprahan tahap kedua bulan Agustus mendatang. Untuk mengamprah tahap kedua, desa wajib melaporkan realisasi di tahap pertama. Kalau tanpa laporan realisasi jelas kami tidak terima dan untuk mengamprah tahap kedua jelas tidak bisa dilakukan," jelas Lanang Sadia. (kmb41)

Edisi : Rabu, 31 Mei 2017

Hal : 8



Molor, Realisasi ✓ Proyek "L Shape"

PEMASANGAN beton *precast* (pracetak) *L Shape* pada saluran irigasi di Badung untuk tahun anggaran 2017 mengalami keterlambatan. Puluhan paket pekerjaan yang rencananya terealisasi awal tahun diperkirakan baru terwujud Juni mendatang.

Dikonfirmasi Selasa (30/5) kemarin, Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung A.A. Gde Dalem membenarkan prihal tersebut. Keterlambatan itu lantaran adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Yang tahun ini (realisasi proyek-red), pelelangan agak telat karena perubahan OPD. Biasanya antara Februari dan Maret proyek sudah jalan, tapi ini mundur sampai Juni," ujarnya.

Menurut Dalem, penggantian saluran irigasi yang dahulu menggunakan pasangan batu ini akan dilakukan di Subak Tungkub Mengwi, Subak Mambal dan Subak Buangga. "Tahun ini ada 50 paket lebih dan semua pakai *L Shape*. Tahun lalu juga hampir semua proyek pakai *L Shape*, kecuali pasangannya tinggi baru pakai *cor cycloop*," jelasnya.

Terkait nilai proyek, pejabat asal Klungkung ini mengatakan bervariasi, tergantung mulai dari Rp 300 juta hingga Rp 5 miliar. "Nominal proyek bervariasi tergantung bobot pekerjaan. Namun, anggaran yang kami kelola untuk proyek pemasangan *L Shape* mencapai Rp 100 miliar lebih," katanya.

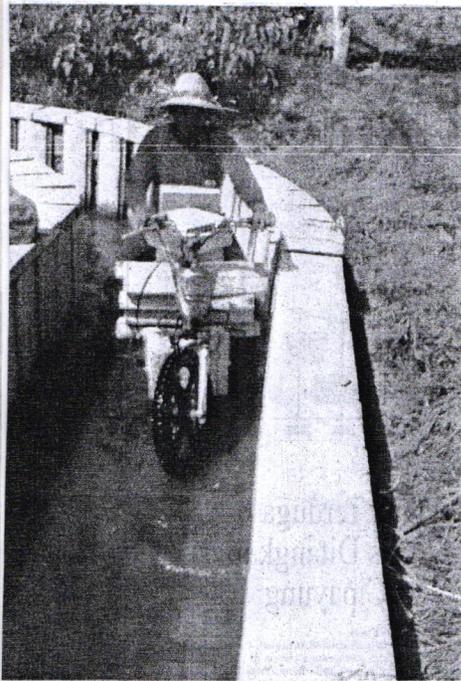
Dalem menambahkan, alasan pemerintah mengganti dari pasangan batu menjadi menggunakan beton *precast L Shape* juga karena lebih praktis dari segi pengerjaan. Satu orang bisa memasang 15 meter dalam

sehari. Artinya, dua kali lipatnya karena dengan pasangan batu paling pekerja proyek hanya mampu menyelesaikan enam meter per hari. "Dulu memang menggunakan pasangan batu, tapi cara konvensional itu kami ganti. Kami merevolusi menggunakan pemasangan beton *precast L Shape*. Kami hitung-hitung saluran yang dimensinya 50 centimeter, dengan diameter satu meter, menggunakan pasangan batu sekitar Rp 1,2 juta. Sementara untuk beton *precast L Shape* Rp 1,6 juta. Agak mahal Rp 400 ribu memang, tapi secara umur beton *precast L Shape* bisa 50 tahun," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Badung I.B. Surya Suamba mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk program penataan ini. Penggunaan beton *precast L Shape* diakui lebih tahan lama dibandingkan dengan pemasangan batu meski secara harga lebih mahal. "Penggunaan beton *precast L Shape* lebih efisien, umum panjang, tuntutan pengerjaan cepat karena petani perlu air," ujarnya.

Surya Suamba mengakui, pembangunan fisik model lama yakni pasangan batu tak cukup kuat. Dalam jangka waktu lima tahun sudah rusak. Berbeda dengan menggunakan beton, umurnya bisa lebih tahan lama dengan jangka waktu bisa 50 tahun. "Kami targetkan dalam lima tahun seluruh saluran irigasi kita mantap demi Badung hebat," tegasnya. (par)

PROYEK L SHAPE - Salah satu proyek L Shape yang dicanangkan Pemkab Badung. Sistem ini akan diterapkan ke seluruh irigasi yang ada di Gumi Keris.





Kejujuran Dalam Pemberian Opini BPK

Tindakan suap-menyuap, sogok-menyogok ternyata tidak pernah berhenti meski banyak instansi dan tokoh telah dijebloskan ke penjara. Perkembangan terbaru terjadi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana oknum auditor utama dan auditornya tertangkap tangan KPK diduga menerima uang sogokan dari oknum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes). Hal itu terjadi demi perubahan opini audit penggunaan keuangan lembaga tersebut dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Oleh
Nyoman Sudarma

Ada dua hal bertentangan dalam kasus ini, yaitu bahwa opini yang dikeluarkan pemerintah terhadap penggunaan keuangan negara itu memberikan efek ketakutan, di mana efek ini akan mendorong atau mengupayakan pada lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja penggunaan uang. Tetapi, pada saat yang sama terlihat bahwa budaya jalan pintas pada masyarakat kita tetap belum hilang untuk mencapai predikat yang diharapkan. Dan jalan pintas yang dipilih itu sangat negatif, yaitu dengan menyogok, menyuap dan sejenisnya. Ini sama sekali tidak mempunyai perbedaan dengan cara peserta didik di Indonesia untuk membeli ijazah, nyontek, membeli gelar dan sebagainya. Atau tidak mempunyai perbedaan dengan masyarakat kita yang memetik buah yang belum matang, lalu memakai karbit untuk mematangkannya dan menjualnya di pasaran. Termasuk juga pedagang pisang goreng yang memakai minyak jelantah untuk memasak. Terlalu banyak lagi contoh yang lain.

Secara sosiologis, ini boleh dikatakan sebagai adanya haki-

ki sifat dasar manusia yang mempunyai dua sifat, yaitu penuh kreasi di satu pihak dan mencari jalan pintas untuk meraih tujuan yang merupakan cermin dari kemalasan kreativitas. Karena lembaga itu dijalankan oleh manusia dan memiliki pemimpin serta kepemimpinan, maka sifat lembaga itu pun mirip dengan manusia. Ciri ini boleh dikatakan "primitif" karena itu merupakan ciri manusia atau kelompok yang belum mendapat pembelajaran atau belum mendapatkan proses pencerahan tentang bagaimana eksistensi kehidupan sosial. Pada masyarakat modern, eksistensi ini biasanya dilakukan dengan cara yang disebut dengan meritokrasi, yang artinya mendapatkan eksistensi (posisi) dalam kehidupan sosial dengan cara jujur, berprestasi dan adil. Kemajuan negarane-negara di dunia hanya akan dapat dicapai apabila melakukan upaya seperti ini. Meritokrasi tersebut akan menjadi budaya dan menyebar ke lingkungan lebih luas yang membuat negara menjadi maju bersama.

Dari sisi pemikiran tersebut, bisa dikatakan bahwa ada sesuatu yang salah pada Kemendes ini. Mendapatkan predikat

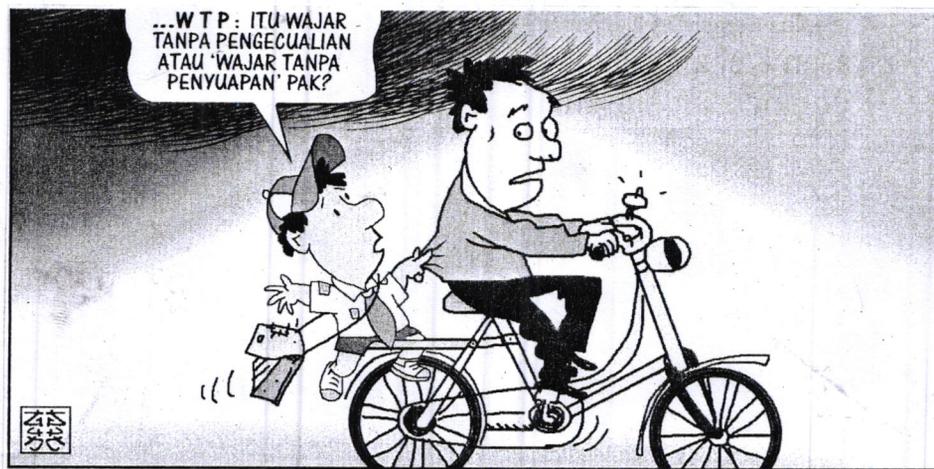
wajar dengan pengecualian merupakan sebuah predikat eksistensi diri (bagi kementerian) itu, dalam posisi jajaran kabinet di Indonesia. Kalau kemudian dibandingkan dengan kementerian yang lain, maka apa yang didapatkan oleh Kementerian Transmigrasi ini boleh dikatakan jauh berbeda dengan kementerian lain. Lebih dari 80 persen dari kementerian Indonesia mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian.

Sebaliknya harus dilihat bahwa ada kemungkinan peristiwa ini merupakan fenomena gunung es. Artinya, banyak peristiwa di institusi pemerintahan yang lain juga melakukan tindakan sama seperti yang dilakukan Kemendes, akan tetapi tidak sempat tertangkap KPK. Kalau ini terjadi, maka predikat WTP yang didapatkan oleh berbagai lembaga, termasuk kementerian itu harus dipertanyakan.

Kalau dilihat dari sisi proses peningkatan mutu, boleh dikatakan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian ini merupakan bahan dasar bagi Indonesia untuk melatih agar para aparat kenegaraan mampu menjalankan administrasinya secara bersih, tanpa korupsi. Dikatakan melatih

Edisi : Rabu, 31 Mei 2017

Hal : 6



karena pada masyarakat yang telah matang dan telah biasa mempraktikkan budaya bersih tidak akan mungkin membuat pemeringkatan opini seperti itu. Pemeringkatan itu sendiri mengandung makna tertentu. Pada opini wajar tanpa pengecualian secara umum dikatakan bahwa lembaga yang bersangkutan telah menggunakan keuangan yang disediakan negara secara positif. Akan tetapi, belum tentu seratus persen bersih dari penyimpangan. Namun opini ini telah memberikan perasaan optimis kepada lembaga beserta perangkatnya. Di samping itu, akan mendapatkan kucuran keuangan yang lebih besar dari pemerintah pada tahun anggaran berikut.

Opini wajar dengan pengecualian bisa dikatakan kalau pemerintah memberikan "ampun" terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Tetapi, pasti akan ada pengurangan drop keuangan. Ini merupakan peringatan bagi institusi yang melakukan tindakan yang tidak beres dalam mengelola keuangan. Sedangkan yang tidak dapat opini merupakan gambaran kinerja buruk, apalagi opini tidak wajar.

Bagi pemerintah, pemberian opini oleh BPK ini tetap perlu dilanjutkan karena mampu memberikan pembelajaran yang komplit. Namun demikian, harus juga disertai pengawasan yang ketat kepada BPK dan petugasnya. Pemberian opini wajar tanpa pengecualian menjadi pendorong bagi lembaga untuk berupaya bertindak bersih dalam melakukan pengelolaan keuangan. Dari sisi kepemimpinan, maka akan dipaksa melakukan pembinaan

dan pengawasan yang lebih ketat. Akan muncul kesadaran dan disiplin dari setiap pegawai. Jika opini wajar tanpa pengecualian itu dapat diraih paling tidak lima kali berturut-turut, secara administratif dan psikologis akan mampu melatih karyawan dan pegawai untuk bertindak jujur dan bersih serta bertanggung jawab dalam penggunaan keuangan. Bagi instansi pemerintah, kebijakan *rolling* pegawai ke berbagai instansi akan memberikan kesempatan pola kerja yang bersih itu menyebar. Sementara opini wajar dengan pengecualian dan predikat tanpa opini akan membuat instansi malu, memberikan efek jera dan merangsang upaya untuk menumbuhkan cara positif dalam mengelola keuangan. Peristiwa tangkap tangan yang terjadi ini, secara positif akan lebih mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk berupaya memperbaiki diri dan meraih predikat wajar tanpa pengecualian.

Pekerjaan penting sekarang adalah mengawasi dan merekrut pegawai BPK agar tidak berperilaku "budeg" dengan menerima suap hanya untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tersebut. Lembaga ini menjadi penentu berhasil tidaknya kita melatih karyawan untuk bekerja secara profesional dengan proses berkesinambungan. Tidak mungkin secara mendadak mengubah budaya demikian. Maka pemberian opini dan pemeringkatannya itu berguna dalam proses kesadaran kita semua agar dapat bekerja lebih baik. Jadi pemberian pemeringkatan opini ini tetap penting, tetapi harus dilakukan dengan jujur.